

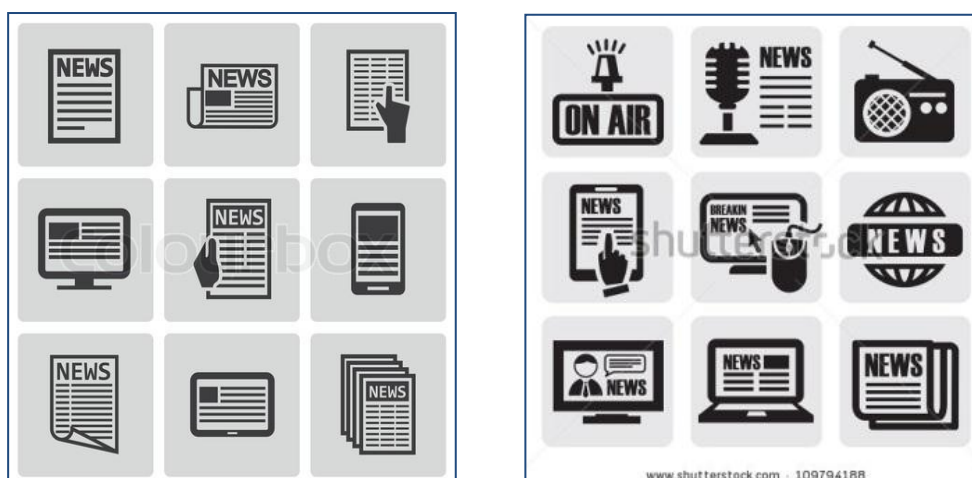


**Kementerian PPN/  
Bappenas**

## **e-Newspaper Media Online**

Sarana & Prasarana

Senin, 6 Oktober 2014



**Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan  
Jakarta, Bappenas  
2014**

## **Daftar Isi**

1. PINDAHKAN JALUR LOGISTIK KE LAUT (*Media Cetak Bisnis Indonesia*)

# Pindahkan Jalur Logistik ke Laut

JAKARTA—Semangat *coastal shipping* yang digagas presiden terpilih Joko Widodo perlu dipertegas ke dalam proyek-proyek infrastruktur prioritas pada rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019.

Surya Mahendra Saputra  
surya.mahendra@bisnis.co.id

Danang Parikesit, Guru Besar Universitas Gadjah Mada mengungkapkan lansekap ekonomi dan pembangunan infrastruktur transportasi ke depan akan mulai diarahkan pada sejumlah isu strategis mulai dari konektivitas, poros maritim dunia, dan konsep tol laut sesuai dengan visi-misi pemerintah baru.

RPJMN 2015-2019 sejatinya memang masih harus menunggu gagasan dan sentuhan pemerintah baru, namun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bergerak cepat mengumpulkan sejumlah teknokrat untuk merancang isu-isu strategis.

Dalam rancangan teknokratis tersebut, bobot proyek-proyek in-

▶ **Ketimpangan porsi angkutan barang di jalur darat, laut, udara, dan kereta api perlu mendapatkan perhatian khusus.**

▶ **Pelabuhan-pelabuhan kecil harus ditinggalkan karena kebanyakan justru jadi pemancingan ikan**

frastruktur transportasi berorientasi jalan raya masih terhinggakan. Kebutuhan pendanaannya ditaksir mencapai Rp679 triliun, sangat timpang dengan alokasi pengembangan pelabuhan.

"Tapi, itu sangat tergantung pada skenarionya Jokowi-Jusuf Kalla. Kalau memang butuh 24 pelabuhan baru, skalanya harus besar. Penyebaran pelabuhan-pelabuhan kecil harus ditinggalkan karena kebanyakan justru jadi pemancingan ikan," kata Danang dalam diskusi pakar bertajuk *Akselerasi Pembangunan Infrastruktur* di kantor redaksi *Bisnis Indonesia* pekan lalu.

Ketimpangan porsi angkutan barang di jalur darat, laut, udara, dan kereta api perlu mendapatkan perhatian khusus. Hingga kini, angkutan jalan berkontribusi 91,25% terhadap arus barang dan logistik nasional, adapun angkutan laut hanya 7,07%.

Disparitas peran yang sangat lebar itu memicu mahalnya ongkos logistik dan sangat membebani dunia usaha karena memicu sumber ekonomi biaya tinggi yang bisa membuat industri nasional kehilangan daya saing. Tak heran,

Indonesia belum menjadi bagian dari poros maritim dunia.

Untuk itu, menurut Danang, pendekatan dan paradigma angkutan barang berbasis maritim mutlak diperlukan. Gagasannya yakni meminimalkan beban logistik di darat ke laut.

Demi mendukung jaringan yang terkoordinasi, pemerintahan baru juga perlu menaruh perhatian terhadap kapasitas pelabuhan. Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, mayoritas pelabuhan yang ada saat ini hanya sanggup menampung kapal-kapal kecil di bawah 1.000 TEUs.

Sejauh ini, Indonesia memiliki 111 pelabuhan utama dan 1.129 pelabuhan kecil yang berfungsi sebagai konektivitas antarpulau, serta 914 terminal khusus yang melayani kepentingan tertentu seperti pelabuhan kelapa sawit, tambang, ataupun kebutuhan khusus lainnya.

Zaldy Mastia, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia, memandang penguatan integrasi logistik sangat dibutuhkan sebelum Indonesia menceburkan diri dalam konektivitas internasional jelang berlakunya masyarakat ekonomi Asean. Konektivitas laut harus diutamakan untuk kepentingan tersebut.

Menurutnya, Indonesia seharusnya cukup mempunyai dua pelabuhan internasional yang terletak di ujung barat dan timur sebagai pintu masuk ke pasar domestik. Dengan begitu, keseimbangan volume arus pengiriman logistik antara kawa dari pulau-pulau lain juga akan tetap terjaga. Selain itu, sambungnya, biaya logistik per-

Kebutuhan Pendanaan Proyek Strategis RPJMN 2015-2019 Bidang Infrastruktur Transportasi Logistik



Sumber: Rancangan Teknokratis RPJMN 2015-2019, ditinjau \*1 aktual kelayakan \*\*11 pembangunan tahun

Proyek Berbasis Jalan	(Rp Triliun)
Jalan Tol Trans-Sumatra	355
Jalan Tol Ruas Cibitung-Cilingjing	4,2
Jalan Tol Manado-Bitung	4,3
Jalan pintas Palu-Parigi	2,22
Jalan tol akses Pelabuhan Tanjung Priok	4,4
Exam ruas jalan tol DKI Jakarta	20,62
Kawasan Strategis Jembatan Selat Sunda	305
Gorontalo Ring Road	0,7
Proyek Berbasis Laut	
Pelabuhan Cimelaya	14,9
Pelabuhan Kuala Tanjung	27
Pelabuhan Malay	4,8
Pelabuhan Bitung	1,15
Proyek Berbasis Udara	
Pengembangan bandara Soekarno-Hatta	26,25
Bandara Kertajati	8,23
Proyek Berbasis Rel	
KA Dabubura Kalimantan Tengah	61
Jalur KA Layang Jakarta	8,9
Jalur KA Kangaroo Aceh Darussalam	5,71
Jalur KA Sulawesi	6,4
MRT dan Tramway Surabaya	0,015*
KA Capot Jakarta-Bandung	57**
MRT Jakarta Utara-Selatan	37,9
MRT Jakarta Barat-Timur	110
Jakarta Monorail	18,3

BisnisM. Rachman

dagangan antarpulau bisa ditekan.

Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, mengatakan selain sisi infrastruktur pelabuhan, tantangan terbesar yang juga terjadi pada moda penunjang logistik seperti bea cukai, angkutan barang, pemandu kapal hingga karantina.

Antarinstansi penunjang ini seharusnya berada dalam satu kesatuan yang membuat arus barang menjadi lancar, bukan masalah ego sektoral masing-masing yang dikedepankan.

Oleh karena itu, menurutnya, Peraturan Presiden No. 26/2012 tentang Sistem Logistik Nasional perlu diubah menjadi UU Logistik

dan Transportasi.

Dengan aturan yang lebih tinggi tersebut, satu pintu kebijakan untuk berbagai aktivitas di lingkungan pelabuhan dan logistik dapat terwujud. "[Regulasi] jangan bertentangan satu dengan yang lain seperti saat ini," tujuannya.

Menurut Yukki, keberadaan Badan Logistik dan Transportasi Nasional yang mengintegrasikan sektor logistik Indonesia menjadi mutlak dibutuhkan. Lembaga ini nantinya dapat berbentuk seperti Unit Kerja Presiden atau Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan yang berada langsung di bawah presiden. (Anggara Purnanda/Lavinia)

**Semangat coastal shipping yang digagas presiden terpilih perlu dipertegas kedalam proyek-proyek infrastruktur prioritas pada rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2014-2019**

Hashtag Berita :

#TransisiPemerintahan

#PembangunanNasional

#RKP(RencanaKerjaPemerintah)

#Infrastruktur